

PERAN LURAH DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (Suatu Studi di Kelurahan Mahakeret Timur Kecamatan Wenang Kota Manado)

Micel George Pelenkahu¹
Ronny Gosal²
Sarah Sambiran³

Abstrak

Salah satu peranan penting pemerintah desa atau kelurahan yaitu dapat menjalankan fungsinya memberdayakan masyarakat, namun secara umum dalam kenyataannya menunjukkan hasil yang kurang memuaskan dimana penilaian kinerja pemberdayaan pemerintah pada masyarakat terkesan sebagai formalitas belaka, tidak melibatkan masyarakat sehingga masyarakat menerima begitu saja pemberdayaan yang dijalankan dimana sumber daya mereka tidak berkembang, musrenbang desa atau kelurahan sebagai bagian pemberdayaan masyarakat hanya sekadar tuntutan tugas semata. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menggambarkan peran Pemerintah lurah sebagai bina manusia dalam pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Mahakeret Timur Kecamatan Wenang Kota Manado, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif diharapkan penelitian ini dapat menjawab secara paripurna mengenai masalah yang diteliti, hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan pemerintah kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu bina manusia, pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui sosialisasi dan penyuluhan program pemberdayaan serta pelibatan masyarakat secara aktif dalam pembangunan. Sosialisasi didominasi dibidang usaha kreatif kepada masyarakat. Bina usaha: pemberdayaan masyarakat berfokus pada pengembangan usaha kelompok dengan memberikan pinjaman modal baik ditujukan untuk kelompok simpan pinjam maupun kelompok usaha yang diwujudkan dengan berbagai macam bantuan yang diberikan baik pemberian modal ataupun dalam bentuk bantuan barang.

Kata Kunci: Peran, Lurah, Pemberdayaan Masyarakat.

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat..

² Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

³ Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

Pendahuluan

Pembangunan Desa atau Kelurahan merupakan pendukung utama keberhasilan pembangunan nasional dimana yang kita ketahui sebagian besar masyarakat Indonesia ada didesa dengan berbagai profesinya, jadi sudah kewajiban bagi pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa/kelurahan dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pemberdayaan diartikan sebagai upaya memenuhi kebutuhan individu, kelompok dan masyarakat luas agar mereka memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan, mengontrol lingkungannya dan dapat memenuhi keinginannya, termasuk aksesibilitasnya terhadap sumberdaya. Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses dimana masyarakat didukung agar mampu meningkatkan kesejahteraannya dengan mandiri. Dengan kata lain pemberdayaan masyarakat merupakan proses meningkatkan kemampuan dan sikap kemandirian masyarakat. Dalam pemberdayaan masyarakat, masyarakatlah yang menjadi aktor dan penentu pembangunan, dari sisi inilah masyarakat difasilitasi untuk mengkaji kebutuhan, masalah serta peluang pembangunan mereka sendiri.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 tentang Kelurahan dijelaskan bahwa Lurah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, maka pembangunan

yang dilaksanakan dengan menggunakan paradigma pemberdayaan sangat diperlukan untuk mewujudkan partisipasi masyarakat dengan berlandaskan prinsip pengelolaan pembangunan yang partisipatif, pada lingkup pemerintah menghadirkan pemerintahan yang jujur, adil, demokratis dan bertanggung jawab begitupun pada tatanan masyarakat mereka dilibatkan dalam dalam proses pembangunan seperti pemberian kekuasaan untuk meningkatkan posisi sosial, ekonomi, budaya dan politik dari masyarakat lokal, sehingga masyarakat mampu memainkan peranan yang signifikan dalam pembangunan.

Salah satu peranan penting pemerintah desa atau kelurahan yaitu dapat menjalankan fungsinya memberdayakan masyarakat. Namun secara umum dalam kenyataannya menunjukkan hasil yang kurang memuaskan dimana penilaian kinerja pemberdayaan pemerintah pada masyarakat terkesan sebagai formalitas belaka, tidak melibatkan masyarakat sehingga masyarakat menerima begitu saja pemberdayaan yang dijalankan sehingga sumber daya mereka tidak berkembang, Musrenbang desa atau kelurahan sebagai bagian pemberdayaan sumber daya masyarakat hanya sekedar tuntutan tugas semata. Pemerintah desa/kelurahan harus mempunyai peranan yang sangat penting terhadap akselerasi pelaksanaan atau implementasi pada proses pembangunan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat akan terlaksana dengan baik bila peran pemerintah serta masyarakat dan partisipasinya juga baik. Oleh karena itu peranan pemerintah dalam menggerakkan partisipasi masyarakat

sangat penting demi kelancaran pembangunan. Untuk mewujudkan pemberdayaan, kesejahteraan, dan kemandirian masyarakat perlu didukung oleh pengelolaan pembangunan yang partisipatif. Pada tatanan pemerintahan diperlukan perilaku pemerintahan yang jujur, terbuka, dan bertanggung jawab sedangkan pada tatanan masyarakat perlu dikembangkan mekanisme yang memberikan peluang peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program pemberdayaan untuk kepentingan bersama. Salah satu fenomena yang menarik untuk dikaji berkaitan dengan judul penelitian yang diangkat yaitu Kelurahan Mahakeret Timur Kecamatan Wenang, secara geografis Kelurahan Mahakeret Timur memiliki potensi cukup strategis dengan luas wilayah 12,38 Km² dengan mata pencaharian sebagian besar penduduknya sangat beragam. Sebagaimana lazimnya penduduk perkotaan lebih dominan bermata pencaharian sebagai pegawai/karyawan pemerintah maupun swasta, berwirausaha, bidang jasa transportasi (ojek, sopir mikrolet, sopir truk, dan lain-lain), bahkan banyak juga yang tidak memiliki pekerjaan tetap, sehingga hal ini mengakibatkan sering terjadinya gesekan-gesekan kecil di masyarakat akibat tindakan masyarakat penganggur yang gemar mengkonsumsi minuman beralkohol. Oleh karena itu tidak mengherankan apabila melihat income perkapita masyarakat yang masih rendah berkisar ±1-2 juta/bulan, terlebih tingkat kesejahteraan masyarakat dari 1.363 KK yang ada di Kelurahan Mahakeret Timur, masih terdapat rumah tangga miskin masih terdapat 329 KK dalam kategori pra sejahtera dan kategori sejahtera 1. Dalam proses pemberdayaan masyarakat, ketersediaan akses sumber

daya merupakan penunjang dalam proses pemberdayaan masyarakat. Ketersediaan sarana prasarana yang dapat mengembangkan potensi sumber daya, pembangunannya masih kurang maksimal hal ini seringkali dikeluhkan masyarakat terkait pelaksanaannya yang tidak berkelanjutan dan kualitas yang masih kurang. Akses sumber daya yang kurang maksimal disebabkan anggaran yang kurang memadai, sesuai yang dikatakan salah seorang tokoh masyarakat dikelurahan bahwa memang sulit karena kurangnya anggaran, berbeda dengan desa yang punya anggaran dana desa dan dana desa, untuk dikelurahan terbatas.

Tinjauan Pustaka

Setiap manusia dalam kehidupannya masing-masing memiliki peran dan fungsi dalam menjalankan kehidupan sosialnya. Dalam melaksanakan perannya, setiap manusia memiliki cara atau sikap yang berbeda-beda. Hal ini sangat dipengaruhi oleh latar belakang kehidupan sosialnya. Dalam Kamus Bahasa Indonesia menyebutkan pengertian peran sebagai berikut :

- a. Peran adalah pemain yang diandaikan dalam sandiwara maka ia adalah pemain sandiwara atau pemain utama.
- b. Peran adalah bagian yang dimainkan oleh seorang pemain dalam sandiwara, ia berusaha bermain dengan baik dalam semua peran yang diberikan.
- c. Peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.

Pemerintah berasal dari kata perintah yang berarti menyuruh melakukan sesuatu. Istilah pemerintahan diartikan sebagai perbuatan dalam artian bahwa cara, hal urusan dan sebagainya dalam

memerintah (Sri Soemantri, 2006:17) sehingga secara etimologi, dapat diartikan sebagai tindakan yang terus menerus (kontinue) atau kebijaksanaan dengan menggunakan suatu rencana maupun akal (rasio) dan tata cara tertentu untuk mencapai tujuan tertentu yang dikehendaki (Utrecht, 1986:28). Pemerintahan dalam arti luas adalah segala kegiatan badan-badan publik yang meliputi kegiatan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam usaha mencapai tujuan negara. Pemerintahan dalam arti sempit adalah segala kegiatan dalam badan-badan publik yang hanya meliputi kekuasaan eksekutif (C.F. Strong 2012:37). Samuel Edward Finer (Syafi'ie 2006:5) dalam bukunya yang terkenal *Comparative Government*, mengatakan bahwa pemerintah harus mempunyai kegiatan terus menerus (process), harus mempunyai Negara tempat kegiatan itu berlangsung (state), mempunyai pejabat pemerintah (the duty) dan mempunyai cara, metode, serta sistem (manner, method, and system) terhadap rakyatnya. Menurut Suhady dalam W. Riawan Tjandra (2009:197) Pemerintah (government) ditinjau dari pengertiannya adalah the authoritative direction and administration of the affairs of men/women in a nation state, city, ect. Dalam bahasa Indonesia sebagai pengarah dan administrasi yang berwenang atas kegiatan masyarakat dalam sebuah Negara, kota dan sebagainya. Pemerintahan dapat juga diartikan sebagai the governing body of a nation, state, city, etc yaitu lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan Negara, Negara bagian, atau kota dan sebagainya. Pemerintah dalam konsep pemerintah daerah, berbeda dengan pemerintah pusat yang dianggap mewakili negara, pemerintah daerah dianggap mewakili masyarakat

karena daerah adalah masyarakat hukum yang tertentu batas-batasnya. Konsep pemerintah didefinisikan oleh Istianto (2009:25) adalah: merupakan suatu bentuk organisasi dasar dalam suatu negara. Tujuan dari pemerintah dikatakan oleh Ateng Syafrudin di kutip Istianto (2009:25) bahwa: Pemerintah harus bersikap mendidik dan memimpin yang diperintah, ia harus serempak dijiwai oleh semangat yang diperintah, menjadi pendukung dari segala sesuatu yang hidup diantara mereka bersama, menciptakan perwujudan segala sesuatu yang diinginkan secara samar-samar oleh semua orang, yang dilukiskan secara nyata dan dituangkan dalam kata-kata oleh orang-orang yang terbaik dan terbesar. Ryas Rasyid membagi fungsi pemerintahan menjadi empat bagian yaitu:

1. Fungsi pelayanan (public service)
2. Fungsi pembangunan (development)
3. Fungsi pemberdayaan (empowering)
4. Fungsi pengaturan (regulation)

Masyarakat adalah sekelompok orang yang memiliki perasaan sama atau menyatu satu sama lain karena mereka saling berbagi identitas, kepentingan-kepentingan yang sama, perasaan memiliki, dan biasanya satu tempat yang sama (Suriadi, 2005:41). Dalam PP No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa Pemberdayaan Masyarakat memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi dan prioritas kebutuhan masyarakat. Pemberdayaan menurut arti secara bahasa adalah proses, cara, perbuatan membuat berdaya, yaitu kemampuan untuk melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak yang berupa

akal, ikhtiar atau upaya (Depdiknas, 2003). Definisi pemberdayaan yang dikemukakan oleh Merriam Webster dan Oxford English Dictionary kata "empower" mengandung dua arti. Pengertian pertama adalah to give power of authority dan pengertian kedua berarti to give ability to or enable. dalam pengertian pertama diartikan sebagai memberi kekuasaan, mengalihkan kekuasaan, atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain. Sedangkan, dalam pengertian kedua, diartikan sebagai upaya untuk memberikan kemampuan atau keberdayaan. Menurut Sumodiningrat (2009:76), bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Adapun pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling terkait, yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan. Dalam konsep pemberdayaan, menurut Prijono dan Pranarka (2008:94), manusia adalah subyek dari dirinya sendiri. Proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan kemampuan kepada masyarakat agar menjadi berdaya, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan pilihan hidupnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa pemberdayaan harus ditujukan pada kelompok atau lapisan masyarakat yang tertinggal.

Metode Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan yakni penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran faktual dengan

argument yang tepat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran melalui proses analisis untuk memahami peran pemerintah kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Mahakeret Timur Kecamatan Wenang Kota Manado. Salah satu metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif data yang diperoleh seperti pengamatan, hasil wawancara, analisis dokumen, catatan lapangan yang disusun oleh peneliti dan tidak dituangkan dalam angka.

Penelitian ini difokuskan pada peran lurah dalam pemberdayaan masyarakat yang diambil berdasarkan teori Mardikanto (2012:113-117) dimana Lingkup kegiatan Pemberdayaan terdiri dari:

a. Bina Manusia

Lingkup pemberdayaan dalam bina manusia difokuskan kepada 2 hal yaitu:

1. Upaya Peningkatan Kemampuan Masyarakat
2. Upaya peningkatan posisi tawar masyarakat

b. Bina Usaha

Bina Usaha yang diupayakan melalui pemberdayaan masyarakat akan mencakup banyak hal, seperti:

1. Peningkatan pengetahuan teknis, utamanya untuk meningkatkan produktivitas, perbaikan mutu dan nilai tambah produk.
2. Perbaikan manajemen untuk meningkatkan efisiensi usaha, dan pengembangan jejaring kemitraan.
3. Pengembangan jiwa kewirausahaan terkait dengan optimasi peluang bisnis yang berbasis dan didukung oleh keunggulan lokal.
4. Peningkatan aksesibilitas terhadap modal, pasar, dan informasi.

Informan merupakan salah satu anggota kelompok partisipan yang berperan sebagai pengarah dan penerjemah muatan-muatan budaya atau pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Informan yang dipilih adalah informan yang benar paham dan mengetahui permasalahan yang dimaksud. Pemilihan informan dapat berubah dan berkembang sesuai dengan kebutuhan data yang dibutuhkan oleh peneliti agar memperoleh data yang akurat. Pemilihan informan dalam penelitian ini dengan cara purposive sampling yaitu, teknik penarikan sample secara subjektif yang mana menganggap bahwa informan yang diambil tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian yang akan dilakukan. Adapun yang dijadikan informan dalam penelitian ini adalah:

- Lurah Mahakeret Timur
- Staf Kelurahan
- Kepala Lingkungan
- Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
- Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Masyarakat

Hasil Penelitian

Berdasarkan dari uraian di atas mengenai peranan pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat sebagai pembina yang terdiri dari bina manusia, bina usaha, bina lingkungan dan bina kelembagaan. Kemudian tidak terlepas dari berbagai faktor yang mempengaruhi peranan pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat Kelurahan Mahakeret Timur yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Hal pendukung tersebut antara lain partisipasi masyarakat berupa kesediaan masyarakat untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan birokrasi pemerintahan dan mendukung terselenggaranya

pembangunan, dan juga kerjasama antar aparat pemerintah kelurahan dalam mendukung pembangunan. Selain faktor pendukung jelas ada faktor penghambat pelaksanaan peran tersebut. Hambatan itu meliputi rendahnya kualitas sumber daya manusia aparat pemerintah kelurahan, serta kurangnya sarana dan prasarana berupa teknologi komputer yang dipakai untuk memperlancar pelayanan administrasi demi perkembangan pembangunan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut:

1. Partisipasi Masyarakat

Secara umum partisipasi merupakan keikutsertaan seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan. Partisipasi merupakan komponen penting dalam menumbuh kembangkan kemandirian dan proses pemberdayaan. Rakyat adalah komponen utama yang harus dilibatkan dalam setiap proses pemberdayaan masyarakat. Masyarakat seharusnya dipandang sebagai subjek pembangunan bukan sebagai objek pembangunan dengan partisipasi masyarakat punya andil dalam proses pemberdayaan didaerahnya. Prinsip dalam partisipasi adalah melibatkan atau peran serta masyarakat secara langsung, dan hanya mungkin dicapai jika masyarakat sendiri ikut ambil bagian, sejak dari awal, proses, dan perumusan hasil. Dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat partisipasi masyarakat perlu diwujudkan untuk menanamkan nilai kesadaran dan kepedulian serta tanggung jawab masyarakat terhadap pentingnya pembangunan yang bertujuan untuk memperbaiki mutu hidup mereka artinya melalui partisipasi yang diberikan, berarti benar-benar menyadari bahwa kegiatan pembangunan bukanlah sekedar kewajiban yang harus dilaksanakan oleh

aparatus pemerintah sendiri melainkan juga menuntut keterlibatan masyarakat yang akan diperbaiki mutu hidupnya.

Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Camat Wenang yang mengatakan bahwa pembangunan dan pemberdayaan akan berhasil ketika program berjalan lalu masyarakat ikut berpartisipasi itu menjadi pendukung utama karena pemberdayaan masyarakat itu bekerja untuk masyarakat jadi ujung tombak pembangunan ada pada masyarakat. Menurut (Wolcook dan Narayan, 2000) partisipasi dibutuhkan untuk mengembangkan sinergi dalam hubungan antara pemerintah dan masyarakat maupun sinergi dalam jejaring komunitas. Partisipasi dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti keikutsertaan masyarakat untuk menghadiri rapat-rapat yang dilaksanakan di kelurahan, memberi ide atau gagasan melalui forum ataupun secara langsung ke aparat, menyumbang tenaga maupun berupa uang atau barang yang sepadan dengan manfaat yang akan diterima oleh masing-masing masyarakat yang bersangkutan, begitupun dengan partisipasi dalam mengevaluasi hasil pembangunan sehingga muncul umpan balik tentang masalah maupun kendala yang muncul dalam pelaksanaannya, serta partisipasi dalam memanfaatkan hasil pembangunan yang sering kali tidak mendapatkan perhatian sehingga terkadang masyarakat tidak paham apa manfaat dari program yang dilakukan.

Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Lingkungan I yang mengatakan bahwa partisipasi masyarakat di kelurahan Mahakeret Timur sudah cukup bagus, setiap ada kegiatan masyarakat pro aktif dan memang partisipasi mereka dominan di tenaga karena semangat lokalnya masih

terjaga. Hal ini dipertegas oleh Tokoh Masyarakat oleh yang mengatakan bahwa keterlibatan masyarakat kebanyakan dalam bentuk gotong royong karena pada umumnya tenaga mereka sumbangkan, untuk sumbangan pemikirannya kita maksimalkan di forum musrenbang jadi kita sampaikan apa yang prioritas di wilayah. Di kelurahan Mahakeret Timur, partisipasi masyarakat merupakan faktor utama terhadap keberhasilan program pemberdayaan masyarakat, mulai dari partisipasi ide/pikiran melalui forum musrenbang, dan didominasi oleh partisipasi tenaga dikarenakan dominasi program pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan swadaya seperti pengerjaan irigasi pertanian dan pembuatan jalan baru, masyarakat sangat antusias dalam pengerjaannya disebabkan masyarakat memahami bahwa apa yang mereka lakukan adalah untuk kepentingan mereka.

2. Kesadaran Masyarakat

Secara harfiah kata "kesadaran" berasal dari kata "sadar", yang berarti insyaf, merasa tahu dan mengerti. Kita sadar jika kita tahu, mengerti, insyaf, dan yakin tentang kondisi tertentu, khususnya sadar atas hak dan kewajibannya sebagai warga Negara. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Widjaja (2006:46) menyatakan bahwa "Kita sadar jika kita tahu, mengerti, insyaf dan yakin tentang kondisi tertentu." Kesadaran masyarakat lahir dari kebiasaan dalam masyarakat, dipengaruhi oleh lingkungan, peraturan-peraturan dan peranan pemerintahnya. Kesadaran masyarakat merupakan salah satu unsur penting dalam pencapaian tujuan program pemberdayaan. Keikutsertaan masyarakat dalam suatu program bukan timbul begitu saja, tetapi karena adanya faktor yang

mendorongnya untuk berpartisipasi. Salah satu diantaranya adalah faktor kesadaran masyarakat itu sendiri. Dengan kesadaran yang muncul, masyarakat diharapkan mampu berperan aktif dalam merumuskan visi pembangunan, dengan begitu tujuan dari proram pemberdayaan masyarakat dapat terwujud. Adanya rasa solidaritas dan sifat kekeluargaan yang masih tinggi sesama warga masyarakat dan ini digunakan untuk saling mengingatkan akan pentingnya pembangunan serta peran pemerintah dalam hal ini yaitu selaku motivator yang senantiasa memberikan motivasi kepada masyarakat untuk ikut ambil bagian dalam pembanguan desa. Indikasi ini memperlihatkan bahwa keikutsertaan masyarakat dalam program pemberdayaan masyarakat relatif tinggi.

3. Tingkat Pendidikan

Menurut Mohammad Ali (2009:58) dalam buku “Pendidikan untuk Pembangunan Nasional” dijelaskan bahwa “pendidikan merupakan sektor yang paling strategis dalam pembangunan nasional”, oleh karena itu aspek yang penting untuk diperhatikan untuk memberdayakan manusia menuju pembangunan adalah pendidikan karena dengan pendidikan kita tidak hanya mempunyai bekal pengetahuan tetapi juga memiliki kemampuan untuk berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan pembangunan masyarakat. Ada dua paradigma yang menjadi kiblat bagi pengambil kebijakan dalam pengembangan kebijakan pendidikan: Paradigma fungsional dan paradigma sosialisasi. Paradigma fungsional melihat bahwa keterbelakangan dan kemiskinan dikarenakan masyarakat tidak mempunyai cukup penduduk yang memiliki pengetahuan, kemampuan dan sikap modern.

4. Keterbatasan Anggaran

Anggaran merupakan rencana kerja sistematis yang dinilai dengan uang yang dibuat dalam bentuk angka-angka serta disusun dalam suatu atau beberapa periode tertentu yang dipakai sebagai alat perencanaan, pengkoordinasian yang terpadu dan pengendalian tanggung jawab manajemen melalui proses tertentu. Anggaran merupakan hal yang paling utama dari setiap kegiatan karena setiap kegiatan memerlukan dan membutuhkan anggaran untuk kelancaran kegiatan tersebut. Apalagi dalam memberdayakan masyarakat hal yang paling utama adalah anggaran. Keterbatasan anggaran dalam sebuah program dapat membuat program yang direncanakan terkendala sebab segala sesuatunya butuh biaya terlebih dengan pemberdayaan dalam pengembangan akses sumber daya butuh biaya yang sangat besar sehingga tanpa anggaran program itu tidak bisa terlaksana. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan kepala lingkungan II yang mengatakan bahwa anggaran memang jadi kendala baik keterbatasan anggaran kelurahan maupun bantuan anggaran dari pemerintah dari atas, seharusnya pemerintah kota misalnya memperhatikan nasib kelurahan terkait ini, mungkin anggapannya kalau kelurahan kehidupannya sudah maju tapi dalam kenyataannya tidak.

5. Pola Pikir Masyarakat

Pola pikir itu adalah bentuk pikir atau cara kita berpikir yang disebut mindset yang merupakan kepercayaan (believe) atau sekumpulan kepercayaan (set of beliefs) atau cara berpikir yang mempengaruhi perilaku (behavior) dan sikap (attitude) seseorang yang akhirnya menentukan level keberhasilan nasib hidupnya. Setiap orang atau manusia secara individu pada dasarnya memiliki ide, pendapat, rencana, cita-cita. Unsur-

unsur tersebut diolah oleh akal dan pikiran yang selalu dipengaruhi atau ditentukan oleh attitude atau sikap perilakunya. Jadi pola pikir adalah cara berpikir seseorang dalam mewujudkan ide, rencana dan cita-citanya yang dalam pelaksanaannya dipengaruhi oleh perasaan dan pandangannya ataupun sikap perilaku (attitude). Dengan kata lain pada suatu saat sikap seseorang dipengaruhi oleh perasaan atau emosinya. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Lurah yang mengatakan bahwa pola pikirnya masyarakat imitasi/peniruan juga bisa jadi penghambat misalnya disosialisasi pertanian ketika ada sosialisasi yang diadakan terus tidak menunjukkan sampel/ccontoh keberhasilan dari apa yang disosialisasikan, masyarakat cenderung tidak tertarik mencoba. Selain pola pikir masyarakat yang susah menerima hal-hal baru dikarenakan tidak ada percontohan yang diberikan terdapat pula pola pikir masyarakat yang statis dan acuh terhadap pembangunan yang dilakukan. Pola pikir masyarakat yang acuh terhadap sebuah program serta tingkat pemahaman masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat menjadi suatu kendala terhadap keberhasilan tujuan pemberdayaan masyarakat, begitupula dengan pola pikir yang lambat menerima hal-hal baru meskipun hal baru tersebut dapat meningkatkan harkat martabat mereka.

6. Aturan Yang Mengikat

Peraturan merupakan pedoman dan ketentuan yang ditetapkan agar manusia hidup tertib dan teratur. Jika tidak terdapat peraturan, manusia bisa bertindak sewenang-wenang, tanpa kendali, dan sulit diatur. Aturan diciptakan untuk mencapai ketertiban dan keamanan dalam suatu wilayah. Setiap daerah punya peraturan yang

mengikat untuk tercapainya tujuan dan setiap aturan harus ditaati dan disepakati bersama. Akan tetapi beberapa peraturan dinilai menghambat dalam pemberdayaan masyarakat, termasuk peraturan tentang pengangkatan perangkat desa yang tertuang dalam Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dalam Bab II Pasal (2) Ayat 2 dijelaskan persyaratan umum menjadi perangkat adalah sebagai berikut: Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat; Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; Terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi. Hal ini berdasarkan hasil wawancara oleh Ketua LPMK yang mengatakan bahwa pemberdayaan berhasil ketika partisipasi ada, kondisi disini partisipasi dibangun lewat tokoh yang ada, seharusnya yang jadi perangkat desa misalnya kepala lingkungan itu adalah tokoh yang saya maksud akan tetapi karena aturan yang ada tidak boleh perangkat kelurahan kalau bukan ijazah sma, dan usia 20-42 tahun. Biasanya dalam satu lurah yang pas untuk itu tidak ada, ada yang cocok umurnya tapi bukan lulusan sma, ada sesuai aturan tapi tidak mau atau tidak terima dimasyarakat disatu sisi ada yang lebih punya karakter kepemimpinan tapi tidak memenuhi syarat.

Kesimpulan

1. Bina manusia: pemberdayaan masyarakat melalui bina manusia dilakukan melalui sosialisasi dan penyuluhan program pemberdayaan serta pelibatan masyarakat secara aktif dalam pembangunan.

- Sosialisasi didominasi dibidang usaha kreatif kepada masyarakat.
2. Bina usaha: pemberdayaan masyarakat melalui bina usaha berfokus pada pengembangan usaha kelompok dengan memberikan pinjaman modal baik ditujukan untuk kelompok simpan pinjam maupun kelompok usaha yang diwujudkan dengan berbagai macam bantuan yang diberikan baik pemberian modal ataupun dalam bentuk bantuan barang.
 3. Bina lingkungan: pemberdayaan masyarakat dalam bina lingkungan baik menjaga lingkungan alam maupun lingkungan sosial, pemerintah kelurahan menerapkan sistem gotong royong jadi membina lingkungan alam dan lingkungan sosial dengan semangat gotong royong. Selain itu dalam bina lingkungan juga diterapkan dengan pembinaan keagamaan.
 4. Bina kelembagaan: pemberdayaan masyarakat dalam bina kelembagaan dilakukan dengan memberikan arahan, pelayanan atau rekomendasi kegiatan yang mudah dan cepat, memfasilitasi kegiatan lembaga masyarakat serta memberikan dukungan kepada lembaga yang ada untuk pelaksanaan fungsi lembaga masyarakat tersebut.

Saran

1. Peningkatan dan penguatan peranan pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat harus lebih dioptimalkan, agar program pemberdayaan masyarakat yang ada di desa berjalan sesuai prakarsa masyarakat karena pada hakikatnya sasaran pembangunan dan pemberdayaan adalah kesejahteraan masyarakat agar tercapai hidup

- sejahtera semua warga masyarakat kelurahan Mahakeret Timur.
2. Untuk aparat pemerintah kelurahan tingkatkan kerjasama yang baik dan hubungan yang harmonis baik pada lembaga masyarakat maupun pada masyarakat dengan mengacu pada konsep keterlibatan masyarakat sehingga masyarakat tidak hanya dijadikan obyek dan pelaku dalam pemberdayaan masyarakat, tetapi juga melibatkan masyarakat dalam menentukan dan membuat program pemberdayaan masyarakat.
 3. Untuk pemerintah pusat dan pemerintah kota lebih memperhatikan nasib kelurahan yang serba kekurangan anggaran, kelurahan karena pada dasarnya semua orang ingin berubah dan perubahan disuatu daerah terletak dari seberapa besar peranan pemerintah didalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilia Theresia, Krishna S Andini, Nugraha, Totok Mardikanto, 2015, *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, Alfabeta, Bandung.
- Arimbi Horoepoetri dan Santosa Achmad, 2005. *Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan*. Jakarta. Walhi.
- C.F. Strong, 2012, *Modern Political Constitutions: An Introduction to the Comparative Study of Their History and Eisting Form (Konstitusi- Konstitusi Politik Modern; Study Perbandingan tentang Sejarah dan Bentuk, diterjemahkan oleh Derta Sri Widowatie)*, Nusamedia, Bandung.
- Dahl, Robert ,1983. *Democracy and Its Critics*. New Haven Conn: Yale University Press.
- Hulme, David & M. Turner, 1990. *Sociology of Development:*

- Theories, Policies and Practices.
Hertfordshire: Harvester
Whearsheaf.
- Istianto, Bambang. 2009. *Manajemen Pemerintahan Dalam Persepektif Pelayanan Publik*. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Inu Kencana Syafie. 2007. *Etika Pemerintahan*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Kartasasmita, Ginandjar. 2007. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.
- Mardikanto, 2010. *Konsep Pemberdayaan Masyarakat*, Penerbit TS, Surakarta.
- Paul, S. 2007. *Community Partisipation in development Project. The World Bank Experience*. Washington, D.C.: The World Bank.
- Prijono, Onny S.& A.M.W. Pranarka (eds.) 2008. *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies.
- Poerwadarminta. 2007. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka
- Riawan Tjandra, 2009, *Peradilan Tata Usaha Negara, Mendorong Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Berwibawa*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Soejono Soekanto. 2009. *Peranan Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Baru, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sri Soemantri, 1992, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara*, Alumni, Bandung.
- Sumaryadi, I Nyoman. 2005 *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta : Citra Utama
- Sumodiningrat, Gunawan. 2009. *Mewujudkan Kesejahteraan Bangsa menanggulangi Kemiskinan dengan Prinsip Pemberdayaan Masyarakat* . Jakarta : PT. Alex Media Komputindo.
- Syafiie, Inu Kencana. 2006. *Sistem Administrasi publik Republik Indonesia (SANKRI)*. Jakarta : PT Bumi Aksara
- Tahir Malik, Dangnga M.S, A. Muhibuddin, Sulkifli Syamsir, 2010, *Metodologi Penelitian dan Aplikasi*, Pustaka Pena Press, Makassar.
- Totok Mardikanto, Poerwoko Soebiato, 2013, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung.
- Utrecht. 2006. *Hukum Pidana I*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas
- Usman, Sunyoto. 2005. *Pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Widjajanti. K. 2011. *Model Pemberdayaan Masyarakat*. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Vol. 12, No. 1: 15-27.
- Widjaja, HAW. 2006. *Otonomi Desa*. PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta.